
KOMUNIKASI POLITIK DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT

Asy Syuaramustdalifah

Zulfahmi Yasir Yunan

Asysyuara, asysyuaramustdalifah@gmail.com, zulfahmiyasir@uhamka.ac.id

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Abstract (English Version)

It has become a general need to include the community so that the implementation of local government can be more dynamic and meet the aspirations of the people. Of course, the results of the wishes exercised out by the DPRD must be executed by voting for every wish that is accepted. The purpose of the preparation of this journal is to find out the importance of public aspirations for political communication, and to determine the impact of political communication with the aspirations of the people. The methods used in this research are descriptive and qualitative approaches. People's aspirations are very important for political communication because, the DPR/DPRD can listen to the aspirations conveyed by the community to achieve what the community wants. There is one example in Panggungharjo Village, where the community conveyed their aspirations to the BPD (Village Consultative Body). This Aspirations Networking event is an activity that welcomes contributions, criticisms and suggestions to the village government, in this case submitted by the BPD of Panggungharjo village. The presence of the BPD (Village Consultative Body) plays an important role in channeling the aspirations of the community, because the BPD (Village Consultative Body) has provided the opportunity for the people of Panggungharjo Village to express their aspirations by means of deliberation and consensus and will be channeled to the village government so that the aspirations of the Panggungharjo Village community are carried out. in accordance with the wishes.

Keywords: *Aspirations; Political communication Village Consultative Body*

Abstrak (Indonesia Version)

Sudah menjadi kebutuhan umum untuk mengikut sertakan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih dinamis dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tentu saja, hasil dari keinginan yang dijalankan oleh DPRD harus dieksekusi dengan memilih setiap keinginan yang diterima. Tujuan penyusunan jurnal ini yaitu, untuk mengetahui pentingnya aspirasi masyarakat terhadap komunikasi politik, dan untuk mengetahui dampak komunikasi politik dengan adanya aspirasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif dan kualitatif. Aspirasi masyarakat sangat penting terhadap komunikasi politik karena, DPR/DPRD dapat mendengarkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan masyarakat. Ada salah satu contoh di Desa Panggungharjo, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Acara Jejaring Aspirasi ini merupakan kegiatan yang

menyambut baik kontribusi, kritik dan saran kepada pemerintah desa, dalam hal ini disampaikan oleh BPD desa Panggunharjo. Kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, karena BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Panggunharjo untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara musyawarah mufakat dan akan di salur kan kepada pemerintah desa agar aspirasi dari masyarakat Desa Panggunharjo terlaksanakan sesuai dengan keinginan.

Kata kunci: Aspirasi; Komunikasi politik; Badan Permusyawaratan Desa

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Komunikasi politik tidak hanya berurusan dengan bentuk-bentuk relasi yang ada dalam pemilu legislatif di negara demokrasi. Juga merupakan bentuk komunikasi yang mencakup proses mengkomunikasikan kepentingan individu atau kelompok masyarakat tertentu kepada organisasi politik tentang pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kepentingan publik tersebut, salah satunya adalah pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Komunikasi politik merupakan ilmu terapan yang memadukan ilmu komunikasi dan ilmu politik. Lingkup diskusi tidak jauh dari ranah politik dan komunikasi, karena kedutaan dan politisi terlibat dalam komunikasi jenis ini (Gulo et al., 2022).

Aspirasi masyarakat diungkapkan dalam dua kata, yaitu aspirasi dan masyarakat. aspirasi sendiri dipahami sebagai harapan dan tujuan sukses untuk masa depan. Mengharapkan realisasi kesuksesan dari sesuatu yang direncanakan sejak awal. Mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 1 harapan dan tujuan sukses dalam masa depan, 2 inspirasi muncul dalam kreativitas. Dari dua arah hisap, bisa jadi Disimpulkan bahwa aspirasi erat kaitannya dengan harapan, tujuan, keinginan, ide, inspirasi, kreasi dan untuk mencapai cita-cita tersebut (Basuki, 2020).

Aspirasi masyarakat / keinginan masyarakat adalah harapan dan tujuan masyarakat untuk berhasil di masa depan dengan mencari nafkah baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat perlu dipertimbangkan ketika pemerintah daerah dan DPRD menyusun rencana dan kebijakan. Selain itu. Kita juga perlu memperkuat peran kelompok pemangku kepentingan dan pers di daerah untuk memajukan DPRD yang lebih ambisius. Pasal 53 UU 10/2004 menyatakan dalam uraian undang-undang ini bahwa jaminan teknis hak masyarakat diatur dengan peraturan DPRD, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan tanpa merinci dampaknya terhadap pemerintah. Kami menjamin hak masyarakat untuk berkontribusi. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan di masa depan, tetapi tidak cukup untuk memastikan munculnya kebijakan yang ambisius (Adianto & Hasim, 2016).

Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa DPRD adalah badan yang mewakili rakyat di daerah dan merupakan bagian dari badan penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD antara lain menerima, mengumpulkan, menyerap, dan memantau aspirasi rakyat (Pasal 45). Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, yang menurutnya anggota

DPRD bupati bersama-sama dengan yang lain wajib menerima dan menagih harapan pemilih melalui kunjungan bisnis dengan cara teratur. mengarsipkan dan melacak aspirasi dan keluhan publik, dan memastikan akuntabilitas moral dan politik pemilih di daerah pemilihannya.

Sudah menjadi kebutuhan umum untuk mengikut sertakan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih dinamis dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tentu saja, hasil dari keinginan yang dijalankan oleh DPRD harus dieksekusi dengan memilih setiap keinginan yang diterima, dan hasil dari keinginan yang dipilih diusulkan sebagai kebijakan publik tingkat komunitas. Pelaksanaan kebijakan publik yang timbul dari keinginan masyarakat harus diawasi oleh DPRD yang bertindak dan bertindak atas nama penduduk pemerintah daerah.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan, permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini antara lain yaitu, apa pentingnya aspirasi masyarakat terhadap komunikasi politik? dan bagaimana dampak komunikasi politik dengan adanya aspirasi masyarakat?. Tujuan penyusunan jurnal ini yaitu, untuk mengetahui pentingnya aspirasi masyarakat terhadap komunikasi politik, dan untuk mengetahui dampak komunikasi politik dengan adanya aspirasi masyarakat. Dalam jurnal ini teori yang digunakan yaitu teori analisis isi, karena datanya sebagian besar dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti jurnal, website berita, dan lain sebagainya. Nantinya akan ada keteranfan pelengkap atau kerangka teori yang membahas tentang komunikasi politik dalam menampung aspirasi masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif dan kualitatif, karena metode ini dapat mengumpulkan berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosial yang akan diteliti melalui media sosail yaitu website, dan akan dibahas lebih lanjut. Dengan adanya jurnal ini, akan merangkum apa yang akan mempengaruhi komunikasi politik dengan aspirasi masyarakat.

3. HASIL

Kajian ilmu politik dalam konteks peran anggota legislatif (DPRD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi politik, di mana partai melakukan kepentingan Agregasi, yaitu menyampaikan segala keinginan atau aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan (rezim) atau pemegang kekuasaan yang berwenang sehingga tuntutan atau dukungan tersebut menjadi perhatian dan menjadi

keputusan kebijakan. kekuasaan (rezim) atau pemegang kekuasaan yang berwenang sehingga tuntutan atau dukungan tersebut menjadi perhatian dan menjadi keputusan kebijakan.

Ari Suryanto, HE selaku ketua BPD dalam sambutannya menjelaskan tentang lembaga BPD dan fungsinya. Ia menyatakan: "BPD merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa Panggungharjo. Anggota BPD merupakan wakil dari masyarakat Desa Panggungharjo secara regional dan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat." Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa keberadaan BPD bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Ari menambahkan: "Salah satu tugas BPD adalah memperoleh informasi, menyimpannya dan mendistribusikannya kepada pemerintah desa. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan forum jejaring aspirasi. Dengan membuka pertanyaan dan komentar yang disampaikan warga kepada BPD. Rahmat, warga RT 03 Krapyak Wetan, mengeluhkan salah satu program pemerintah desa menangani sampah. "Apa program untuk kepala desa dimana setiap Padukuhan memiliki TPA (Bank Sampah)? karena kita berjuang untuk menghilangkannya, katanya akan dikumpulkan setiap 2 hari, "kata Rahmat, merujuk pengaduannya ke TPA. Dia juga mengatakan bahwa kondisi bumi semakin buruk. Yang akan terjadi kemudian adalah pengeringan air karena kondisi tanah mulai memburuk. Rahmat menjelaskan: "Lahan semakin sedikit, dan jika ada kran, penduduk ramai. Muhidin RT 05 Krapyak Wetan menyampaikan keluhannya tentang masalah sampah: "Sampah di Piyungan tidak bisa ditampung lagi karena mobil tidak bisa masuk. Mobil yang akan ke Piyungan harus memiliki izin dari Kabupaten/Kota. Karena itu, kami membutuhkan TPS sementara, agar kantong sampah bisa mengangkutnya," kata Muhidin. Dia juga berbagi keluhan tentang kebisingan jalan dan emisi yang mempengaruhi istirahat malam warga. Muhidin menjelaskan kepada Bhabinkamtibmas: "Tidak ada mobil plastik baru yang lambat, ada juga yang menggunakan peredam sangat keras untuk dapat mengontrol." Kemudian Joko Seto, warga RT 12 Krapyak Wetan, bertanya kepada BPD. "Apakah BPD pernah menanggapi dan menyelidiki harga pemakaman di Krapyak? Informasi beberapa wali berbeda, harganya sangat tinggi, tetapi yang meninggal lebih buruk," kata Joko saat ditanyai BPD. Joko juga menambahkan pertanyaan terkait status keperdataan, mekanisme tidak ikut. Surat Edaran Bantul No. 474 /245 pencatatan sipil 118/8/2017. Camat bersaudara tidak melalui RT dan Dukuh. Bahkan RT tidak pernah mengalami penambahan penduduk. Tidak ada surat dari RT untuk layanan lain dll. Joko menambahkan, menjelaskan masalah status perkawinan. Beberapa pertanyaan dan keluhan warga ditangani oleh BPD. Setelah sesi penyampaian yang

bermasalah berakhir, BPD memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut. Berawal dari masalah sampah dan TPA Piyungan. Ari Suryanto, SE menjelaskan bukan lagi wacana bahwa pada tahun 2021 TPA Piyungan akan ditutup. Dan kedepannya diharapkan desa Pangunharjo mampu menangani masalah sampah secara mandiri. “Memang benar tahun 2021 TPA Piyungan akan ditutup. Hingga saat ini, kami pemerintah desa terus memperjuangkan pengelolaan sampah mandiri. Satu-satunya cara untuk mengelola sampah setiap rumah tangga. Ke depan, masing-masing RT akan membuka bank sampah,” kata Ari menjawab pertanyaan warga tentang tong sampah. Bereaksi dengan air terhidrasi. Nanti kami akan laporkan ke pihak desa agar bisa kami tindak lanjuti. “Setelah itu, kami akan menghubungi pemerintah desa. Dan untuk pembangunan sumur resapan, warga harus berkonsultasi dengan APBDES dan mengajukan proposalnya. Menjawab pertanyaan tentang cacing. Ari menjelaskan hal itu sudah dilakukannya sejak Januari di setiap kamling,” kata Ari. : “Untuk jumlah yang banyak, Pak Ali Yahya sudah mengalokasikan ke setiap dusun sejak Januari. Sedangkan untuk soal tingkat keseriusan, “Proporsi berat menyangkut kearifan lokal pokgiat dan Pak Dukuh. RT duduk bersama mengajukan usulan Ari untuk menjawab pertanyaan tersebut.” menanyakan tingkat keseriusan. Beliau juga menambahkan bahwa “Kami Masalah kependudukan akan diteruskan ke kepala bagian kependudukan,” tambah Ari. Dan untuk masalah emisi blombongan, "kita biarkan Pak Jaduk yang mengurus. pindah nanti," jelasnya (Patel, 2019).

Transformasi aspirasi tersebut tentunya membutuhkan dukungan masyarakat desa, termasuk memberikan masukan dan pelaporan tentang kemajuan pemerintahan desa. Karena dari peran serta masyarakat dalam pembangunanlah arah pembangunan desa ditentukan. Sebagai tugas pemerintah desa adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika ada dorongan dan seruan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pada dasarnya merekalah yang menerima dan membuka aspirasi masyarakat serta mendorong pentingnya pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, tentunya anggota masyarakat harus dilibatkan dalam berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan obyektif masyarakat yang bersangkutan. Di sini, partisipasi bukan hanya partisipasi pejabat, tetapi juga aliran kritik, saran dan aliran ke tempat yang tepat, dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam artian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat desa untuk memenuhi

kebutuhannya guna mendukung pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa ini akan direview oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan desa agar dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut pengamatan penulis di Desa Panggungharjo sudah menyampaikan aspirasi dengan baik dan akan ditampung oleh BPD dan akan di sampaikan ke pemerintah desa. Masyarakat Desa Panggungharjo akan menunggu hasil yang telah di sampaikan, semoga beberapa aspirasi yang telah disampaikan terlaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Panggungharjo.

4. PEMBAHASAN

Aspirasi adalah harapan dan tujuan sukses di masa depan. Cita-cita tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan yang ada. Aspirasi dalam bahasa Inggris, 'aspiration' berarti ideal. Aspirasi dalam kata dasar, berarti ideal atau bahkan keinginan. aspirasi adalah gairah (hasrat atau harapan yang kuat). Menurut kamus umum bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah harapan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak, setiap orang memiliki rencana hidup. Aspirasi mengarahkan aktivitas individu Lebih fokus untuk mencapai tujuan itu. Atau bisa disebut juga dengan upaya masyarakat yang sekumpulan ide/gagasan berupa kebutuhan formal dari semua lapisan masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam bentuk produk, layanan, dll. Itu harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan keinginan orang adalah saran dan harapan yang tidak terpenuhi Jika pemerintah sendiri tidak berbuat apa-apa (Nim, 2016).

Sebagai seorang ahli politik Maswadi Rauf mengartikan komunikasi politik sebagai berikut yaitu, komunikasi politik adalah subjek penelitian ilmu politik. Hal ini karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi tidak hanya dibentuk oleh kekuatan politik negara dan pemerintah, tetapi juga oleh politik yang terkait dengan aktivitas komunikator dalam posisinya. Pelaku aksi politik. Bisa juga proses dimana informasi politik yang relevan ditransmisikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain dan antar sistem politik. Kajian ilmu politik dalam konteks peran anggota legislatif (DPRD) dalam menyampaikan kehendak rakyat, dalam bidang komunikasi politik, di mana partai-partai berpartisipasi dalam sintesis kepentingan. Kepentingan agregat, yaitu menyampaikan segala keinginan atau aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan (rezim) atau orang yang berwenang memegang kekuasaan sehingga permintaan (klaim) atau dukungan (support) menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).

Proses komunikasi politik dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya yang disengaja untuk mempengaruhi lingkungan politik dengan mengubah atau mempertahankan sesuatu. Dengan demikian, komunikasi politik banyak dikaitkan dengan upaya membujuk publik. Aspirasi masyarakat erat kaitannya dengan politik, terutama di era keterbukaan seperti era reformasi di Indonesia. Hal ini juga terjadi di sebagian besar dunia, di mana transparansi dan kebebasan dalam konteks informasi adalah yang terpenting. Aspirasi masyarakat menarik untuk dibahas karena memiliki banyak variabel dalam prosesnya, dimana komunikasi politik akan selalu berjalan beriringan dengan mereka. Tidak ada proses politik yang terjadi tanpa komunikasi politik. Tidak ada proses komunikasi politik yang terjadi, jika tidak membentuk kehendak masyarakat. Dengan demikian, peran aspirasi masyarakat cukup esensial dalam proses komunikasi politik. Komunikasi politik berhubungan erat dengan aspirasi masyarakat saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Karena dalam ilmu komunikasi politik sangat penting berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Aspirasi masyarakat merupakan hasil dari kegiatan komunikasi politik. Dalam komunikasi politik yang dipimpin oleh pemerintah akan diterjemahkan ke dalam aspirasi masyarakat berkembang mengenai tentang komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah. Dan aspirasi masyarakat yang berkembang akan mempengaruhi strategi penggunaan komunikasi politik oleh komunikator politik (Indrawan, 2017).

Aspirasi masyarakat sangat penting terhadap komunikasi politik karena, DPR/DPRD dapat mendengarkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan masyarakat. Ada salah satu contoh di Desa Panggungharjo, masyarakat

menyampaikan aspirasinya kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Desa Panggungharjo menjadi tuan rumah acara Jaringan Aspirasi Masyarakat di Joglo RT 05 Krapyak Wetan milik Pak H Ridwan Hasyim. Jaringan aspirasi ini mewakili kring utara yang meliputi desa Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, Dongkelan dan Glugo. Turut hadir perwakilan pimpinan RT, PKK, karang taruna, desa-desa di wilayah Kring selatan, serta Bhabinkamtibmas dari desa Panggungharjo. Acara dimulai pada pukul 20:30 WIB diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Desa dan ketua BPD. Acara Jejaring Aspirasi ini merupakan kegiatan yang menyambut baik kontribusi, kritik dan saran kepada pemerintah desa, dalam hal ini disampaikan oleh BPD desa Panggungharjo.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa, dan desa adat yang disebut juga dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa bukan bagian dari kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki kontrol yang lebih besar atas wilayahnya. Namun, dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan menjadi distrik kecil. Untuk menjalankan kewenangan kepemilikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa atau disebut juga dengan nama lain adalah organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa atas dasar keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis. Keputusan desa atau yang lebih dikenal dengan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati isu-isu strategis. Merupakan organisasi dan forum legislatif yang fungsinya menerima dan membuka aspirasi masyarakat. Badan ini pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa, dengan kedudukan yang setara dalam kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Langoy, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 wewenang dan tugas BPD antara lain, yaitu:

1. Menampung, menggali, merumuskan, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Membentuk kepanitiaan pemilihan kepala desa.
3. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Budiarti, 2020).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang menunjukkan demokrasi dalam pengelolaan desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari warga desa yang bersangkutan secara regional. Anggota BPD antara lain ketua RW, adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya. Masa tugas anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang/diusulkan kembali untuk satu kali tugas berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam rangka menyambut dan membuka aspirasi masyarakat. yang dia wakili. Pasal 55 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut: a. membahas dan menyepakati usulan penyelesaian desa dengan kepala desa; b. mengantisipasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan lain-lain. mengawasi pelaksanaan kepala desa. Dari keterangan dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa salah satu fungsi BPD adalah membuka aspirasi masyarakat.

Sebagai anggota masyarakat, kita sendiri pun perlu menggunakan suara kita dalam bidang politik. Alih-alih menjadi orang yang apatis, ketika ada kebijakan yang tidak pro rakyat kita harus berani mengkritisi. Ada banyak kejadian di mana pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan yang sudah dibuat karena masyarakat memberikan aspirasinya secara berani. Jika budaya komunikasi yang terbuka dan interaktif seperti ini bisa terus dipelihara, maka iklim demokrasi kita akan semakin baik. Bukan hanya mengkritik, ketika pemerintah sudah melakukan hal yang baik kita juga perlu mengapresiasi pekerjaan mereka (Yasmin, n.d.).

5. SIMPULAN

Komunikasi politik adalah bidang atau disiplin ilmu yang mengkaji perilaku dan komunikasi yang bersifat politis, memiliki konsekuensi politik, atau mempengaruhi perilaku politik. Komunikasi politik dengan demikian memiliki implikasi atau konsekuensi bagi aktivisme politik. Perilaku dan aktivitas politik berkaitan erat dengan pembentukan aspirasi masyarakat, karena tindakan dan aktivitas politik yang berorientasi pada masyarakat sering terjadi karena sifat kolektif yang dikenal dengan Aspirasi masyarakat. Kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, karena BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Panggungharjo untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara musyawarah mufakat dan akan di salur kan kepada pemerintah desa agar aspirasi dari masyarakat Desa Panggungharjo terlaksanakan sesuai dengan keinginan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adianto, A., & Hasim, &. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23–32.
- Basuki, A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, 5(03), 325–343.
- Budiarti, novi yulia. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Gulo, D. J., Simamora, P. R. T., & ... (2022). Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. ... *Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/1261%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/download/1261/1078>
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>
- Langoy, F. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. 2018, 1–20.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Pengertian Komunikasi Politik. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–25.
- Nim, E. (2016). *POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2013 DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Oleh : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PATTERNS OF COMMUNICATION IN POLITICS PARLIAMENT ABSORBING MEMBERS OF S. 4*, 1–18.

Website

- Patel. (2019). 済無No Title No Title No Title. Sambung Rasa.
<https://www.panggungharjo.desa.id/jaring-aspirasi-masyarakat-oleh-bpd-desa-panggungharjo/>
- Yasmin, R. (n.d.). No Title. Binus University. Retrieved July 13, 2022, from
<https://binus.ac.id/malang/2020/06/politik-dan-komunikasi/>